

**PT.BPR**  
**MUHADI SETIA BUDI**

**LAPORAN**  
**TAHUNAN**

**Tahun**  
**2025**

## PENDAHULUAN

### A. TENTANG LAPORAN TAHUNAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-Nya sehingga PT. BPR Muhadi Setia Budi Kabupaten Brebes dapat menutup tahun buku 2025 dengan kinerja yang tetap solid ditengah dinamika ekonomi nasional maupun regional. Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada para pemangku kepentingan, sekaligus sebagai sarana komunikasi korporasi yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Sepanjang tahun 2025, PT. BPR Muhadi Setia Budi terus memperkuat perannya sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan eksternal dan perubahan regulasi, Perseroan tetap mampu menjaga stabilitas operasional, meningkatkan kualitas aset, serta mendorong efisiensi dan transformasi digital secara bertahap. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, seluruh insan perusahaan, mitra strategis, serta para nasabah yang telah memberikan dukungan, dedikasi dan kepercayaan penuh terhadap keberlangsungan usaha PT. BPR Muhadi Setia Budi. Dengan semangat pelayanan yang profesional dan berintegritas, PT. BPR Muhadi Setia Budi senantiasa berkomitmen untuk menjadi lembaga keuangan yang sehat, kuat, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Laporan Tahunan 2025 ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan, serta sebagai refleksi atas pencapaian dan tantangan yang dihadapi. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, PT. BPR Muhadi Setia Budi siap melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya.

### B. PENDIRIAN PERUSAHAAN

PT. BPR Muhadi Setia Budi berdiri berdasarkan akta notaris Anis Sulistyani, SH., M.Kn No 06 tanggal 06 Januari 2017 yang kedudukan di Kabupaten Brebes. Akta tersebut telah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU-001778.AH.01.01 tahun 2017. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan yakni sesuai Akta No 110 tanggal 29 Maret 2018 Ani Sulistyani, SH., M.Kn yang telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Surat No AHU-00075598.AH.01.02 Tahun 2018. Lalu Akta No 23 tanggal 14 Oktober 2019 dengan Notaris Syiva Alfiani, SH., M.Kn yang telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0084174.AH.01.02 Tahun 2019. Kemudian pada Akta Syiva Alfiani, SH., M.Kn Nomor 4 tanggal 12 Juni 2023. Akta Syiva Alfiani, SH., M.KN telah mengalami perubahan sesuai Akta No 3 tanggal 03 Agustus 2023, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-004069.AH.01.02 Tahun 2023. Akta tersebut mengalami perubahan sesuai Akta Syiva Afliani, SH., M.Kn No 7 tanggal 14 Juni tahun 2024 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-AH.01.03-0148688 tanggal 19 Juni 2024. Nomor Induk Berusaha Perusahaan yaitu 9120014152024 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2023 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan adalah 81.746.004.1-501.000 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-106/D.03/2018 Tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Muhadi Setia Budi.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan keuangan untuk memberikan informasi mengenai posisi laporan keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan serta menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya manusia yang dipercayakan padanya. Laporan tahunan ini disusun berdasarkan kaidah-kaidah atau aturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru, sehingga laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang diharapkan.

## BAB I LAPORAN TAHUNAN

### A. INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

#### 1. Kepengurusan

Berdasarkan RUPS PT BPR Muhadi Setia Budi tentang penetapan dan pengangkatan pengurus PT BPR Muhadi Setia Budi yang telah dinotariilkan dengan Akta No 110 tanggal 29 Maret 2018 oleh Syiva Alfiani, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Brebes. Pada tanggal 11 Juli 2018 susunan pengurus PT BPR Muhadi Setia Budi adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama
1.	Komisaris Utama	Drs. H. M. Supriyono
2.	Komisaris	Ahmad Sudibyو, SE
3.	Direktur Utama	H. Dwoyo Widyono, SE
4.	Direktur Operasional & Kepatuhan	Hariman, SE. CA

PT BPR Muhadi Setia Budi sudah mengangkat Pejabat Eksekutif. Adapun susunanya sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama
1.	Pejabat Eksekutif Operasional dan Umum	Nur Rizki Amalia
2.	Pejabat Eksekutif Audit Internal	Khaerul Prio Subekhi
3.	Pejabat Eksekutif Pemantau Risiko dan Kepatuhan	Akhmad Zaeni
4.	Pejabat Eksekutif Pemasaran Dana	Akhmad Saripin
5.	Pejabat Eksekutif Pemasaran Kredit	Edi Santoso
6.	Kepala Cabang Slawi	Agung Supriyanto
7.	Kepala Cabang Ketanggungan	Wahyu Setyartono

#### 2. Kepemilikan

Komposisi Kepemilikan PT. BPR Muhadi Setia Budi per 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan akta notaris terakhir yaitu dengan modal dasar Rp.32.000.000.000,- Modal yang belum disetor berjumlah Rp.22.000.000.000,- dan modal yang sudah disetor Rp.10.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jumlah Lembar Saham	Prosentase Kepemilikan	Total
Muhadi Setia Budi	6.300	63%	Rp. 6.300.000.000
Ati Sri Subekti	2.500	25%	Rp. 2.500.000.000
Dedy Yon Supriyono	400	4%	Rp. 400.000.000
Dian Ayu Merisawati	400	4%	Rp. 400.000.000
Yanti Ria Anggraeni	400	4%	Rp. 400.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>10.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp.10.000.000.000</b>

### 3. Perkembangan Usaha

#### 3.1 Riwayat Ringkas Pendirian PT. BPR Muhadi Setia Budi

PT. BPR Muhadi Setia Budi didirikan berdasarkan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas dan telah dituangkan dalam akta notaris nomor 6 tanggal 6 April 2017 yang di buat di hadapan notaris Ani Sulistiyani, SH., M.Kn dan telah disahkan melalui keputusan Menteri hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0017758.AH.01.01. Tahun 2017. Pada tahun 2018 berdasarkan keputusan Rapat Perseroan terdapat perubahan mengenai susunan pengurus dan jumlah modal dasar perusahaan yang kemudian dituangkan dalam akta nomor 110 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Muhadi Setia Budi tanggal 29 Maret 2018 serta telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0007598.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 5 April 2018 serta Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemberian Izin Operasional yang diberikan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-106/D.03/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pemberian Izin usaha Perseroan Terbatas bank Perkreditan Rakyat Muhadi Setia Budi.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Muhadi Setia Budi bergerak dalam bidang pelayanan jasa perbankan yang meliputi penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan dan Deposito kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit yang diberikan. Bank mulai menjalankan operasional di bidang layanan jasa keuangan pada tanggal 17 Juli 2018. Kantor Pusat PT. Bank Perkreditan Rakyat Muhadi Setia Budi berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman nomor 125 Kabupaten Brebes.

#### 3.2 Ikhtisar Data Keuangan

- Pendapatan dan beban oprasional
  - Pendapatan Operasional  
Pendapatan Operasional PT BPR Muhadi Setia Budi posisi Desember 2025 adalah sebesar Rp. 11.664.073.842,-
  - Beban Operasional  
Jumlah Beban Operasional PT BPR Muhadi Setia Budi posisi Desember 2025 adalah sebesar Rp. 7.648.027.970,-
- Pendapatan dan Beban Non Operasional
  - Pendapatan Non Operasional  
Pendapatan Non Operasional PT BPR Muhadi Setia Budi posisi Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1.971.513.777,-
  - Beban Non Operasional  
Beban Non Operasional PT BPR Muhadi Setia Budi posisi Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1.676.435.230,-
- Laba Rugi Sebelum Pajak  
Laba Rugi Sebelum Pajak PT BPR Muhadi Setia Budi posisi Desember 2025 adalah sebesar Rp. 4.311.124.419,-
- Beban Pajak Kini  
Beban Pajak Kini PT BPR Muhadi Setia Budi posisi Desember 2025 sebesar Rp. 777.744.761,-
- Beban Pajak Tangguhan  
Beban Pajak Tangguhan PT BPR Muhadi Setia Budi posisi Desember 2025 sebesar Rp.37.520.020,-
- Laba Bersih  
Laba Bersih PT BPR Muhadi Setia Budi posisi Desember 2025 sebesar Rp. 3.570.899.677,-

### 3.3 Rasio Keuangan

- Kualitas Aset Produktif (KAP)  
Jumlah Aset Produktif yang diklasifikasikan Rp. 1.756.554.009,-  
Jumlah Aset Produktif Rp. 110.376.814.794,-  
Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap aset produktif KAP sebesar 1,59%
- Rasio Non Performing Loan (NPL) Gross  
Total Kredit Bermasalah Rp. 2.231.924.676,-  
Total Kredit Rp. 73.405.784.169,-  
Rasio NPL Gross sebesar 3,04 %
- Rasio Non Performing Loan (NPL) Nett  
Total Kredit Bermasalah - CKPN Rp. 1.921.507.860,-  
Total Kredit – Provisi diterima dimuka Rp. 72.867.086.227,-  
Rasio NPL Nett sebesar 2,63 %
- Return on Asset (ROA)  
Laba sebelum Pajak Rp. 4.311.124.419,-  
Rata-rata total Aset Rp. 9.981.510.263,-  
ROA sebesar 43,19 %
- Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)  
Beban Operasional Rp. 7.648.027.970,-  
Pendapatan Operasional Rp. 11.664.073.842,-  
BOPO sebesar 65,57%
- Cash Ratio (CR)  
Alat Likuid Rp. 15.676.562.725,-  
Kewajiban Lancar Rp. 50.731.273.569,-  
Cash Ratio sebesar 30,90 %
- Loan To Deposit Ratio (LDR)  
Kredit yang diberikan Rp. 73.405.784.169,-  
Dana yang diterima Rp. 80.948.804.960,-  
LDR (Loan Deposit Ratio) sebesar 90,68%
- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)  
Rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Modal Rp. 12.193.203.672,-  
ATMR Rp. 67.017.636.026,-  
KPMM sebesar 18,19 %

### 3.4 Perbandingan Jumlah Kredit Bermasalah Kredit dengan Total Kredit yang Diberikan serta Penyebab Utama Kredit Bermasalah

Jumlah kredit yang diberikan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 73.405.784.169,-	
Kolektibilitas Lancar	Rp. 69.102.626.854,-
Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus	Rp. 2.071.232.639,-
Kolektibilitas Kurang Lancar	Rp. 303.035.771,-
Kolektibilitas Diragukan	Rp. 1.295.411.125,-
Kolektibilitas Macet	Rp. 633.477.780,-
Jumlah Kredit Bermasalah	Rp. 2.231.924.676,-

### 3.5 Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap BPR Pada Periode Laporan

Pada tahun anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 PT BPR Muhadi Setia Budi dalam melakukan Layanan Jasa Keuangan berpedoman pada Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah dibuat dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 4. Strategi dan Kebijakan Manajemen

Kegiatan operasional BPR Muhadi Setia Budi selalu berpedoman pada risiko-risiko yang mungkin timbul akibat dari aktivitas fungsional BPR sehingga proses mitigasi risiko bisa dijalankan. Dalam rangka proses mitigasi risiko yang mungkin timbul akibat dari aktivitas fungsional BPR perlu melakukan penerapan manajemen risiko terhadap 6 risiko diantaranya :

### 1. Risiko Kredit

- Memberikan masukan dan pertimbangan risiko kepada komite kredit dalam memutuskan pemberian, perpanjangan ataupun pengurangan fasilitas Kredit kepada debitur.
- Melaksanakan fungsi *credit review* dalam memberikan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu proposal kredit.
- Memantau proses kelengkapan dokumen kredit sebelum dan setelah pencairan, termasuk proses pengikatan agunan.
- Memantau marketing kredit dalam menangani keterlambatan angsuran dalam batas 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan.
- Melakukan kunjungan langsung kerumah debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran.
- Melakukan pengawasan dan mengevaluasi hasil kerja petugas Pengawas Pembinaan Kredit (PPK).
- Melakukan negosiasi penyelesaian kredit bermasalah dengan debitur beserta penjamin.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama bagi Marketing Kredit dan Pengawas Pembinaan Kredit (PPK) melalui kegiatan pendidikan, pelatihan maupun sosialisasi.
- Pemetaan kredit bermasalah berdasarkan prioritas penanganan kredit bermasalah.
- Menyusun profil risiko kredit setiap semester.

### 2. Risiko Operasional

- Meningkatkan fungsi pengawasan melekat pimpinan satuan kerja.
- Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengamanan dan pengendalian transaksi.
- Melakukan proses pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Pemantau Risiko dan Pejabat Eksekutif Audit Intern.
- Menetapkan kebijakan operasional dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko operasional.
- Melakukan administrasi data histori risiko operasional untuk keperluan pengukuran besarnya risiko.
- Menyusun profil risiko operasional setiap semester.

### 3. Risiko Kepatuhan

- Memantau penerbitan atau perubahan regulasi yang berkaitan dengan industri BPR.
- Melakukan *review SOP (Standard Operating Procedure)* terhadap seluruh produk dan Satuan Kerja di BPR Muhadi Setia Budi disesuaikan dengan kondisi terkini.
- Mengomunikasikan kebijakan baik internal maupun eksternal kepada seluruh karyawan pada setiap jenjang organisasi.

- Melakukan kajian terhadap seluruh konsep kebijakan dan ketentuan yang akan ditetapkan dan memastikan bahwa seluruh konsep tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Membuat *timeline* dan memantau pemenuhan pelaksanaan daftar kewajiban bulanan yang harus dilaksanakan, terutama kewajiban terkait kewajiban dengan pihak eksternal yang kemudian dikirimkan kepada seluruh kantor BPR Muhadi Setia Budi.
- Melakukan kunjungan ke kantor-kantor cabang untuk meninjau kembali tingkat kepatuhan kantor tersebut terhadap ketentuan yang berlaku.
- Menyusun profil risiko kepatuhan setiap semester.
- Memantau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, ketertiban tutup sistem akhir hari dan ketertiban input agunan.

#### 4. Risiko Likuiditas

- Meningkatkan fungsi pemantauan dan monitoring terhadap dana BPR Muhadi Setia Budi yang ditempatkan pada lembaga perbankan lain.
- Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengendalian kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga.
- Menetapkan kebijakan likuiditas dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko likuiditas.
- Melakukan administrasi data histori risiko likuiditas untuk keperluan pengukuran besarnya risiko.
- Menyusun profil risiko likuiditas setiap semester.

#### 5. Risiko Reputasi

- Menetapkan kebijakan reputasi dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko reputasi.
- Melakukan administrasi pengaduan nasabah dan tindak lanjut pengaduan nasabah secara rutin.
- Melakukan laporan publikasi keuangan secara rutin pertahun dan per tri wulan.
- Transparansi produk dan layanan BPR Muhadi Setia Budi melalui media cetak maupun elektronik serta melalui kegiatan sosialisasi kepada nasabah dan mitra bisnis BPR Muhadi Setia Budi.
- Memantau *review* atau komentar pada media sosial BPR Muhadi Setia Budi.
- Melakukan administrasi data histori risiko reputasi untuk keperluan pengukuran besarnya risiko.
- Menyusun profil risiko reputasi setiap semester.

#### 6. Risiko Strategis

- Menetapkan kebijakan strategis yang tercermin dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko strategis.
- Mengadministrasikan data histori risiko strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk keperluan pengukuran besarnya risiko.
- Menyusun profil risiko strategis setiap semester.

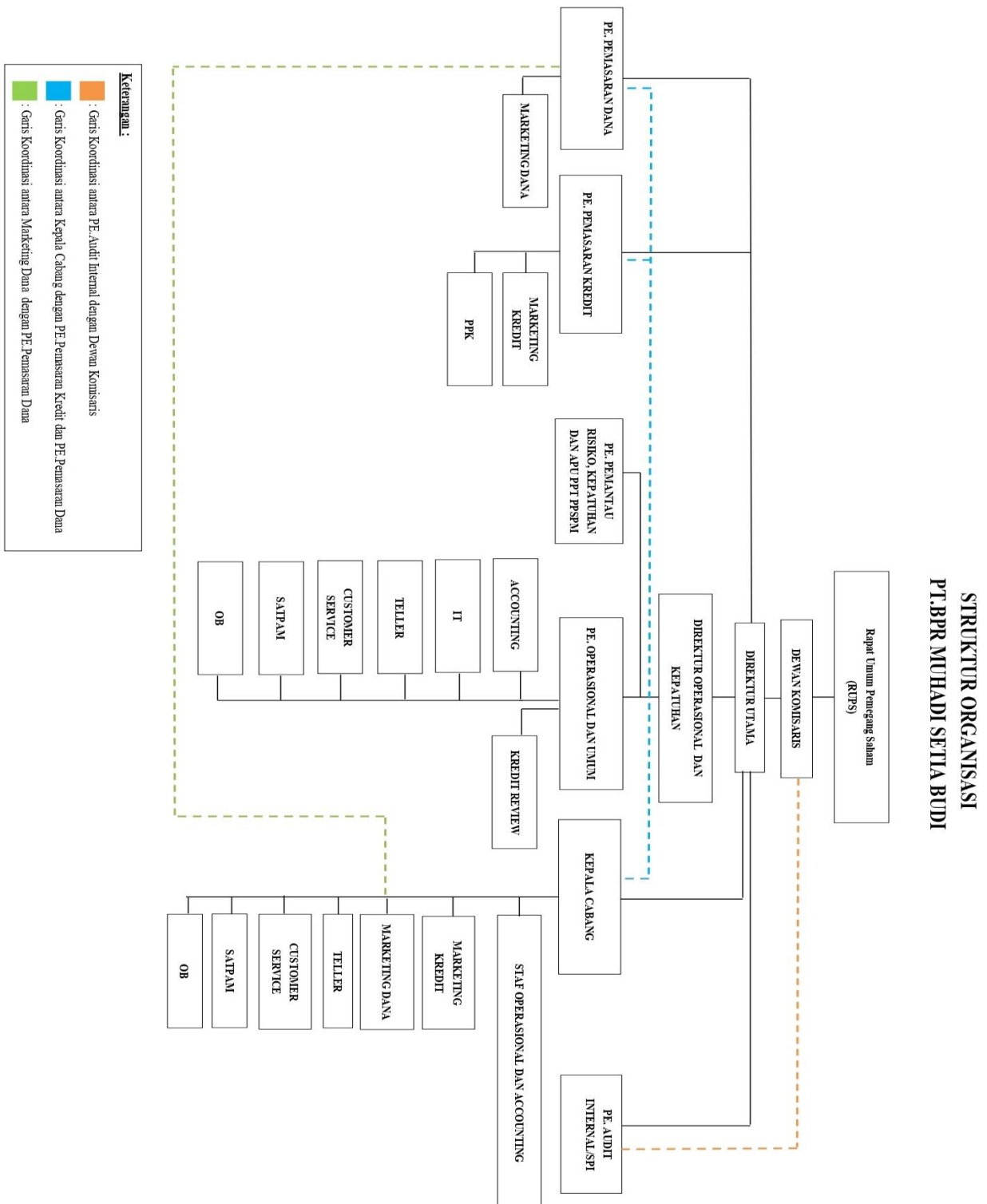
Sebagai bentuk pengendalian risiko yang dilakukan oleh BPR Muhadi Setia Budi maka dibentuk suatu sistem pengendalian intern yang dijalankan secara menyeluruh dan efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

## 5. Laporan Manajemen

PT. BPR Muhadi Setia Budi senantiasa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan sistem dan prosedur operasional. Penataan sumber daya manusia di dalam organisasi akan mampu mewujudkan tata Kelola yang baik (*good corporate governance*) dan terpenuhinya perlindungan hak-hak konsumen bagi nasabah dalam memanfaatkan produk PT. BPR Muhadi Setia Budi.

### 5.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. BPR Muhadi Setia Budi sebagaimana terlampir



## 5.2 Bidang Usaha

Sesuai dengan undang-undang perbankan, aktivitas utama PT. BPR Muhadi Setia Budi adalah sebagai BPR yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta menjalankan usaha perbankan lainnya yang masih diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

### 5.2.1 Produk Tabungan

#### 1. Tabungan Masa Depan (TAMASDEP)

Tabungan masa depan atau biasa disebut TAMASDEP merupakan tabungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum perorangan atau badan usaha maupun Yayasan dengan ketentuan setor awal tabungan sebesar Rp. 50.000,-. Keunggulan tabungan TAMASDEP suku bunga lebih tinggi yaitu 4,5% pertahun dan dikenakan biaya administrasi rekening bulanan sebesar Rp.1.000,-, dengan layanan jemput bola serta tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

#### 2. Tabungan Simpanan Masyarakat Umum (SIMAUM)

Tabungan simpanan masyarakat umum atau biasa disebut SIMAUM merupakan tabungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum perorangan atau instansi dengan ketentuan setor awal sebesar Rp. 10.000,-. Keunggulan tabungan SIMAUM suku bunga tinggi yaitu 4% pertahun dan dikenakan biaya administrasi rekening bulanan sebesar Rp.1.000,-, dengan layanan jemput bola serta tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

#### 3. Tabungan Simpanan Pelajar Amanah (SIMPEL AMANAH)

Tabungan simpanan pelajar amanah atau biasa disebut SIMPEL AMANAH merupakan tabungan yang diperuntukan bagi siswa-siswi sekolah atau pelajar dari tingkat TK s/d SMA dengan ketentuan setor awal sebesar Rp. 5.000,-. Keunggulan tabungan SIMPEL AMANAH suku bunga 2,5% pertahun dan tidak dikenakan biaya administrasi rekening perbulannya dengan layanan jemput bola serta tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

#### 4. Tabungan Simpanan Berjangka (SIJAKA)

Tabungan simpanan berjangka atau biasa disebut SIJAKA merupakan tabungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dengan ketentuan nasabah boleh memiliki lebih dari 1 (satu) rekening, setoran awal sebesar Rp. 50.000,- pengambilan tabungan dilakukan setelah jatuh tempo dengan jangka waktu 3 s.d 5 tahun. Keunggulan tabungan SIJAKA dengan suku bunga tinggi yaitu 4,5% pertahun dan biaya administrasi rekening perbulan Rp. 1.000,-, disediakan layanan jemput bola serta tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

#### 5. Tabungan Hari Raya

Tabungan hari raya merupakan tabungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dengan bentuk paket, per paket sebesar Rp. 300.000,- untuk dapat membuka paket tabungan hari raya minimal 10 (sepuluh) bulan sebelum bulan puasa (Ramadhan). Tabungan hari raya hanya bisa diambil menjelang lebaran dan saldo tabungan sudah terpenuhi, nasabah berhak memperoleh bunga yang dialihkan dalam bentuk parcel.

#### 6. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Setoran minimum deposito adalah Rp. 1.000.000,- suku bunga sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku.

## 5.2.2 Produk Pembiayaan

### 1. Kredit Multiguna Guru Sejahtera

Kredit multiguna guru sejahtera merupakan pembiayaan konsumtif yang diperuntukan untuk Bapak/Ibu Guru yang sudah menerima tunjangan sertifikasi atau tunjangan insentif baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Adapun ketentuannya diatur melalui Surat Keputusan Direksi tersendiri.

### 2. Kredit Pegawai

Kredit pegawai merupakan pembiayaan konsumtif yang diperuntukan untuk pegawai-pegawai yang perusahaannya telah bekerjasama (MoU) dengan PT BPR Muhadi Setia Budi dengan sistem pemotongan angsuran melalui bendahara perusahaan. Adapun ketentuannya diatur melalui Surat Keputusan Direksi tersendiri.

### 3. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kredit usaha mikro, kecil dan menengah merupakan pembiayaan modal kerja yang diperuntukan masyarakat umum yang sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya. Adapun ketentuannya diatur melalui Surat Keputusan Direksi tersendiri.

### 4. Kredit Musiman

Kredit Musiman merupakan pembiayaan modal kerja yang diperuntukan untuk masyarakat umum yang sudah memiliki usaha yang sumber penghasilannya musiman atau dalam jangka waktu tertentu. Adapun ketentuannya diatur melalui Surat Keputusan Direksi tersendiri.

### 5. Kredit Internal

Kredit internal merupakan pembiayaan khusus karyawan PT BPR Muhadi Setia Budi dengan suku bunga khusus dan dipersyaratkan khusus dengan sistem potong gaji setiap bulannya. Adapun ketentuannya diatur melalui Surat Keputusan Direksi tersendiri.

## 5.3 Teknologi Informasi

### a. Sistem Operasional

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis, PT BPR Muhadi Setia Budi berupaya melakukan pengembangan dalam hal layanan prima kepada nasabah debitur. Perluasan layanan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam rangka memajukan teknologi perbankan selaras dengan perkembangan teknologi perbankan yang lebih mutakhir, efektif, efisien serta aman yaitu dengan :

1. Bekerjasama dengan layanan *Core banking system* PT. Mitranet Software Online (MSO) termasuk menyediakan layanan WA Blast untuk nasabah yang terintegrasi dengan nomor rekening nasabah dengan nomor Whatsapp nasabah sebagai informasi/ *notifikasi* ketika terdapat aktivitas dana masuk maupun dana keluar.
2. Bekerjasama dengan Dukcapil dalam hal pengecekan identitas kartu KTP bagi setiap calon nasabah dengan tujuan menghindari identitas KTP palsu.
3. Menyediakan layanan Mobile Collection bagi petugas marketing dana maupun petugas pengawas pembina kredit (PPK) dalam hal terdapat setoran masuk tabungan maupun angsuran kredit serta jika terdapat penarikan tabungan. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan petugas karena layanan *mobile collection* terintegrasi langsung dengan nomor rekening nasabah secara *realtime*.

### b. Sistem Keamanan

Sistem keamanan sepenuhnya dikelola oleh vendor *Core Banking System* yaitu PT. Mitranet Software Online (MSO).

### c. Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Dalam menggunakan, mengembangkan, mengelola dan melakukan *maintenance* terhadap TI, PT. BPR Muhadi Setia Budi bekerja sama dengan penyedia jasa yaitu: PT. Mitranet Software Online (MSO) sebagai Vendor *Core Banking System*.

## 5.4 Perkembangan dan Target Pasar

Berikut posisi keuangan PT BPR Muhadi Setia Budi Desember 2025 :

### 1. Kas

Saldo kas yang ada di teller dan brankas pada Desember 2025 sebesar Rp. 305.532.100,-

### 2. Penempatan pada Bank lain

Antar bank Aktiva (ABA) yang ditempatkan pada bank lain berupa Tabungan, Giro dan Deposito. Posisi ABA tahun 2025 adalah sebesar Rp. 36.968.456.976,-

#### PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Merupakan penempatan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka pada bank lain dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Penempatan	2025			Jumlah
	Giro/tabungan/deposito	Jangka Waktu (Bulan)	Tingkat bunga per tahun	
PT. BPD Jawa Tengah 1-004-00857-6	Giro	-	1,75%	1.124.690.873
PT. Bank Jawa Barat 06666777888001	Giro	-	1,65%	1.141.632.297
PT. BTN 00627013000006	Giro	-	2,00%	1.859.190.703
PT. Bank Permata 971242086	Giro	-	2,45%	518.547.962
PT. BRI 58670100002330	Giro	-	1,75%	418.360.302
PT. Bank Syariah Mega Indonesia 2010301111	Giro	-	2,00%	1.277.646.951
PT. Bank Mandiri 1390027869910	Giro	-	1,00%	800.677.492
PT. BCA 1312777899	Giro	-	1,00%	1.858.830.338
PT. BRI 00140100260530	Giro	-	1,00%	48.404.093
PT Bank Niaga 8001-9096-9900	Giro	-	1,20%	1.980.064.993
Bank Syariah Indonesia 7309689393	Giro	-	3,00%	1.985.122.732
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional 00183007912	Giro	-	1,50%	1.001.309.959
PT Bank Mandiri (Persero) 1390030765972	Giro	-	1,00%	7.150.787
PT Bank Bukopin 3802200003	Tabungan	-	0,25%	58.920.604
PT BPR Karyajatnika Sadaya 3002365862	Tabungan	-	1,80%	441.557
PT BPD Jawa Tengah 2035361530	Tabungan	-	1,50%	705.850.474
PT BPD Jawa Tengah 2028232902	Tabungan	-	1,80%	584.188.507
PT. BPD Jawa Tengah A 304125	Deposito Umum	4	3,00%	100.000.000
BPR Satya Artha 01.30.000035	Deposito Umum	4	6,25%	500.000.000
PT. BPR Prima Dadi Arta 001785	Deposito Umum	4	6,00%	500.000.000
PT. BPR Prima Dadi Arta 001786	Deposito Umum	4	6,00%	500.000.000
PT BPR KERTA RAHARJA PERSERODA 1630000015	Deposito Umum	4	6,25%	1.000.000.000
PT BPR KERTA RAHARJA PERSERODA 1630000016	Deposito Umum	4	6,25%	1.000.000.000
PT BPR Bank Tegal Perseroda 000450	Deposito Umum	7	6,00%	1.500.000.000
PT BPR Dassa AA-006153	Deposito Umum	4	6,00%	1.000.000.000
PT BPR Dassa AA-006152	Deposito Umum	4	6,00%	1.000.000.000
PT Bank Mayapada International 1398756	Deposito Umum	4	3,50%	2.000.000.000
PT BPR Nusumma Jatim 0003000381	Deposito Umum	4	6,00%	1.000.000.000
PT BPR Nusumma Jatim 0003000381	Deposito Umum	4	6,00%	1.000.000.000
PT BPR BUANA DANA MAKMUR 0013000128	Deposito Umum	4	6,00%	1.000.000.000
PD BPR Bank Daerah Bojonegoro 00012368	Deposito Umum	4	6,00%	1.000.000.000
PT BPR Subang Gemi Nastiti 001.2.01205.2	Deposito Umum	4	6,00%	500.000.000
PT BPR Bank Daerah Bojonegoro 00012369	Deposito Umum	4	6,00%	1.000.000.000
PT BPR Surya Artha Utama Perse 101200004313	Deposito Umum	4	6,25%	1.000.000.000
PT BPR Surya Artha Utama Perse 101200004312	Deposito Umum	4	6,25%	1.000.000.000
PT BPR Bank Jombang 7152000043	Deposito Umum	4	6,00%	1.000.000.000
PT BPR Bank Jombang 7152000042	Deposito Umum	4	6,00%	1.000.000.000
PT BPR TATA ASIA 00103400001009	Deposito Umum	4	6,00%	1.000.000.000
PT BPR TATA ASIA 00103400001010	Deposito Umum	4	6,00%	1.000.000.000
PT BPR KIRANA INDONESIA 00120042657	Deposito Umum	3	6,00%	500.000.000
PT BPR KIRANA INDONESIA 00120062816	Deposito Umum	4	6,00%	500.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>36.971.030.625</b>
<b>PPAP Penempatan Umum</b>				<b>2.573.649</b>
<b>Jumlah penempatan pada bank lain-netto</b>				<b>36.968.456.976</b>

### 3. Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan oleh BPR kepada pihak ketiga bukan bank termasuk kredit kepada pengurus dan pegawai BPR. Posisi kredit Desember tahun 2025 adalah sebesar Rp.73.405.784.169,-

### 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibentuk BPR Muhadi Setia Budi untuk menutupi potensi kerugian akibat penurunan nilai aset finansial, terutama risiko kredit macet. Hal ini berfungsi menjaga stabilitas keuangan dan permodalan BPR Muhadi Setia Budi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perkeonomian Rakyat.

CKPN	2025
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	310.416.816,-

### 5. Aktiva Tetap dan Inventaris

Aktiva tetap dan inventaris pada posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.388.174.925,-

### 6. Aset lain – lain

Aset lain – lain pada posisi 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 972.358.523,-

### 7. Kewajiban segera dibayar

Kewajiban-kewajiban yang dapat segera dibayar posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp.464.153.254,-

#### KEWAJIBAN SEGERA DIBAYAR

Kewajiban segera dibayar dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Kewajiban kepada Pemerintah	65.260.768	44.530.704
Titipan Nasabah/Pihak Ketiga	178.889.986	547.392.870
Dividen yang belum dibayarkan	-	-
Lainnya	-	-
Titipan Lain - Premi yang akan dibayar	-	25.967.600
Titipan Lain - Nasabah lainnya	-	-
Titipan - asuransi	-	-
Lainnya	220.002.500	-
<b>Jumlah</b>	<b>464.153.254</b>	<b>617.891.174</b>

### 8. Kewajiban Lain-Lain

Kewajiban bunga yang telah jatuh tempo sampai dengan akhir Desember tahun 2025 sebesar Rp. 1.193.108.513,-

#### KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Kewajiban lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2024
Taksiran pajak PPh	-	-
Cadangan Pendidikan	-	-
Cadangan Promosi	-	-
Cadangan Promosi dan Edukasi	-	-
Utang bunga	-	-
Deposito	166.146.114	226.819.511
Simpanan dari bank lain	62.390.278	62.042.362
Pihak ketiga bukan bank	-	-
Kewajiban imbalan kerja	-	90.406.880
Pendapatan yang ditangguhkan	-	216.657
Lainnya	964.572.121	22.021.922
<b>Jumlah</b>	<b>1.193.108.513</b>	<b>401.507.332</b>

## 9. Utang Pajak

Pada posisi akhir Desember tahun 2025 terdapat utang pajak sebesar Rp. 323.412.111,-

## 10. Tabungan

Tabungan merupakan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh BPR dari masyarakat dan disalurkan kembali melalui pembiayaan atau kredit. Posisi Tabungan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 23.478.835.729,-

## 11. Deposito

Deposito merupakan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh BPR dengan ketentuan pengambilan berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp. 26.788.284.586,-

## 12. Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman yang diterima posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp. 19.306.630.036,-

### PINJAMAN YANG DITERIMA

	2025	2024
Pinjaman yang diterima dengan rincian sebagai berikut:		
PT. Bank Jateng	19.400.000.042	14.650.000.021
Biaya Transaksi	93.370.006	97.830.625
<b>Jumlah</b>	<b>19.306.630.036</b>	<b>14.552.169.396</b>

- Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit 18 Akta Notariil Farah Fauzia dengan jenis kredit yaitu kredit kepada APEX BPR Bank Jateng Plafond Rp5.000.000.000,00 dengan jangka waktu 48 bulan suku bunga ditetapkan sebesar 9,5% p.a effective (floating rate), dengan provisi sebesar 0,5% dari plafon kredit dan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,00
- Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 Akta Nomor 31 Akta Notariil oleh Hj. Chandra Puspasari Setyaningrum, SH., M.Kn dengan jenis kredit yaitu kredit KMK BPR - installment dengan plafond sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan jangka waktu 60 bulan dengan suku bunga 10,25% p.a efektif dengan biaya rovisi sebesar 0,5% dan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,00

## 13. Modal

Modal disetor sampai akhir Desember 2025 adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Modal	2025
Modal Dasar	Rp. 32.000.000.000,-
Modal Belum Disetor	Rp. 22.000.000.000,-
Total	Rp. 10.000.000.000,-

## 14. Cadangan

Cadangan posisi 31 Desember 2025 yang terdiri dari cadangan umum dan cadangan tujuan, yaitu :

Cadangan	2025
Cadangan Umum	Rp. 1.960.569.532,-
Cadangan Tujuan	Rp. 490.142.383,-

## 15. Laba/Rugi

Laba Rugi BPR Muhadi Setia Budi periode Januari 2025 s/d Desember 2025 sebesar Rp.3.570.899.677,-

### SALDO LABA (RUGI)

	2025	2024
Laba (Rugi) tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:		
Saldo Awal	2.255.914.795	2.047.490.333
Penggunaan :		
CSR	(112.795.740)	(102.374.517)
Jasa Produksi	(338.387.219)	(307.123.550)
Cadangan Umum dan Tujuan	(563.978.699)	(511.872.584)
Pembagian Dividen	(1.240.753.137)	(1.126.119.683)
Penambahan :		
Koreksi Laba (Rugi) Ditahan	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.570.899.677	2.255.914.796
<b>Jumlah</b>	<b>3.570.899.677</b>	<b>2.255.914.795</b>

## 16. Target Pasar

Strategi dalam pengembangan usaha BPR khususnya dalam pengembangan produk adalah dengan melakukan usaha penetrasi pasar dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta melihat perkembangan perekonomian secara umum. Dalam hal ini BPR tetap berpedoman pada *prudential banking* dalam mengembangkan usahanya yaitu selektif dalam menjalin hubungan dengan para nasabahnya maupun mitra kerja serta menjalankan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan membangun serta memperluas jaringan meliputi wilayah Kabupaten Brebes dan sekitarnya, untuk mendukung pemasaran produk PT. BPR Muhadi Setia Budi telah membentuk jaringan kerja serta mitra usaha yang terdiri atas :

- a. Perusahaan Swasta (Dedy Jaya Group) untuk penyaluran kredit pegawai.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal untuk penyaluran kredit multiguna guru sejahtera.
- c. Sektor Lembaga atau instansi untuk kegiatan pendanaan dan perkreditan.
- d. Sektor Perdagangan untuk kegiatan pendanaan dan perkreditan.

## 5.5 Jaringan Kerja dan Mitra Usaha

Jaringan kerja PT. BPR Muhadi Setia Budi meliputi Wilayah Kabupaten Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal serta Kabupaten Pemalang. Selain mempunyai nasabah perorangan juga mempunyai beberapa mitra kerja kelompok/ instansi antara lain :

- a. Perusahaan Swasta (Dedy Jaya Group) untuk kegiatan pendanaan dan perkreditan.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
- c. Sektor Lembaga atau instansi untuk kegiatan pendanaan dan perkreditan.
- d. Sektor Perdagangan untuk kegiatan pendanaan dan perkreditan.

## 5.6 Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor

PT. BPR Muhadi Setia Budi memiliki beberapa jaringan kantor yang terdiri dari :

1. Kantor Pusat Operasional yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 125 Kabupaten Brebes.
2. Kantor Cabang Ketanggungan yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro Dukuh Tengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
3. Kantor Cabang Slawi yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 6 Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

## 5.7 Kepemilikan

Kepemilikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam kelompok usaha BPR tidak ada. Kepemilikan untuk pelaporan tahun buku 2025 adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Lembar Saham	Prosentase Kepemilikan	Total
Muhadi Setia Budi	6.300	63%	Rp. 6.300.000.000
Ati Sri Subekti	2.500	25%	Rp. 2.500.000.000
Dedy Yon Supriyono	400	4%	Rp. 400.000.000
Dian Ayu Merisawati	400	4%	Rp. 400.000.000
Yanti Ria Anggraeni	400	4%	Rp. 400.000.000

## 5.8 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM baik dari tingkat karyawan sampai dengan pengurus terdiri dari :

- Dewan Komisaris : 2 Orang
- Direksi : 2 Orang
- Pejabat Eksekutif : 5 Orang
- Pimpinan Cabang : 2 Orang
- Accounting : 1 Orang
- IT : 1 Orang
- Admin Kredit : 1 Orang
- Staff Operasional dan Accounting : 2 Orang
- Customer Service : 3 Orang
- Teller : 3 Orang
- Marketing Dana : 6 Orang
- Marketing Kredit : 9 Orang
- PPK : 1 Orang
- Satpam : 6 Orang
- Office Boy : 3 Orang

Dengan semangat untuk selalu meningkatkan Strata pendidikan maka posisi tingkat pendidikan dari seluruh Pegawai PT. BPR Muhadi Setia Budi Brebes sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan	Jumlah SDM
S2	1 Orang
S1	22 Orang
D3	9 Orang
SLTA	15 Orang
<b>Total</b>	<b>47 Orang</b>

Catatan :

Beberapa pelatihan yang diadakan oleh PT. BPR Muhadi Setia Budi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tanggal	Acara	Penyelenggara	Yang Mengikuti
17/01/2025	Sosialisasi apolo modul laporan berkala bulanan BPR/BPRS	OJK	Accounting dan TI
20/01/2025	Pemaparan dan diskusi mengenai perhitungan pembentukan CKPN sesuai SAK EP	OJK	Pejabat Eksekutif Operasional dan Umum, dan Accounting
20/01/2025	Sosialisasi penerapan SAK EP pada sistem MBS-ONLINE	MSO	Pejabat Eksekutif Operasional dan Umum, dan TI
30/01/2025	Workshop pelaporan literasi dan inklusi keuangan melalui SIPEDULI	OJK	Pejabat Eksekutif Pemasaran Dana
04/02/2025	UND SOS standar akuntansi keuangan Entitas Privat dan Surat Edaran OJK panduan akuntansi perbankan BPR	OJK	Pejabat Eksekutif Operasional dan Umum

26/02/2025	Sosialisasi penerapan CKPN	MSO	Pejabat Eksekutif Operasional dan Umum, dan TI
13/06/2025	Workshop CKPN	MSO	Pejabat Eksekutif Operasional dan Umum, dan TI
29/07/2025	PJJ Aplikasi Digital Risk Based Audit	PERBARINDO	Pejabat Eksekutif Audit Internal
26/08/2025	PTM PE Kredit	PERBARINDO	Pejabat Eksekutif Pemasran Kredit
26/08/2025	PTM PE Dana	PERBARINDO	Pejabat Eksekutif Pemasaran Dana
16/10/2025	Sosialisasi POJK No 11 tahun 2025 tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjamin	OJK	Pejabat Eksekutif Operasional dan Umum
29/10/2025	Forum GRC "penguatan implementasi GRC sektor jasa keuangan, peran profesi penunjang"	OJK	Pejabat Eksekutif Pemantau Risiko dan Kepatuhan
30/10/2025	UND workshop pelaporan rencana kegiatan literasi dan inklusi keuangan melalui SIPEDULI KPD PUJK	OJK	Pejabat Eksekutif Pemasaran Dana
30/12/2025	UND sosialisasi ketentuan POJK & PADK tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh BPR dan BPRS	OJK	Pejabat Eksekutif Pemantau Risiko dan Kepatuhan, dan TI
30/12/2025	PTM PE Audit Internal	PERBARINDO	Pejabat Eksekutif Audit Internal

## 5.9 Kebijakan pemberian gaji dan fasilitas bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan

Kebijakan pemberian gaji dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Perusahaan.

### 5.10 *Subsequent Event*

Pada tahun 2025 tidak terjadi peristiwa penting setelah tanggal penutupan neraca yang mempengaruhi operasional PT. BPR Muhadi Setia Budi.

B. LAPORAN KEUANGAN  
1. Neraca

**NERACA**  
**PT. BPR MUHADI SETIA BUDI 31 DESEMBER 2025**

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
<b>ASET</b>			
Kas	3	305.532.100	272.681.999
Penempatan pada Bank Lain	4	36.968.456.976	21.727.486.925
Kredit yang diberikan	5	76.285.274.292	71.192.588.344
Agunan yang diambil alih	6	3.760.806.314	1.315.091.787
Aset Tetap	7	1.388.174.925	1.299.871.641
Aset Pajak Tangguhan	8	37.520.020	-
Aset Tak Berwujud	9	60.000.000	67.500.000
Aset Lain-Lain	10	972.358.523	1.488.892.430
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>119.778.123.150</b>	<b>97.364.113.127</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Segera Dibayar	11	464.153.254	617.891.174
Utang Pajak	12	323.412.111	259.498.470
Tabungan	13	23.478.835.729	19.883.492.181
Deposito Berjangka	14	26.788.284.586	21.678.218.200
Simpanan dari Bank Lain	15	32.109.871.041	25.609.251.455
Pinjaman yang Diterima	16	19.306.630.036	14.552.169.396
Utang Imbalan Pasca Kerja	17	92.216.288	219.436.908
Kewajiban Lain-lain	18	1.193.108.513	401.507.332
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>103.756.511.558</b>	<b>83.221.465.116</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Dasar	19	10.000.000.000	10.000.000.000
Saldo Laba (Rugi)	20		4.142.648.011
- Laba (Rugi) Ditahan		2.255.914.795	-
- Pembayaran CSR		(112.795.740)	-
- Pembayaran Jasa Produksi		(338.387.219)	-
- Pembayaran Cadangan Umum dan Tujuan		(563.978.699)	-
- Pembagian Dividen		(1.240.753.137)	-
- Koreksi Laba (Rugi) Ditahan		-	-
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan		3.570.899.677	-
- Pembentukan Cadangan Umum		1.960.569.532	-
- Pembentukan Cadangan Tujuan		490.142.383	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>16.021.611.592</b>	<b>14.142.648.011</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>119.778.123.150</b>	<b>97.364.113.127</b>

## 2. Laporan Laba Rugi

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Bunga	21	15.635.149.875	11.282.982.195
Provisi Kredit	21	625.332.968	627.817.722
Administrasi		-	-
Koreksi atas pendapatan bunga	21	(11.192.596)	(147.290.240)
Jumlah		<u>16.249.290.247</u>	<u>11.763.509.677</u>
Beban Bunga	22	5.845.365.532	4.928.369.226
<i>Pendapatan Bunga Bersih</i>		<u>10.403.924.715</u>	<u>6.835.140.451</u>
Pendapatan Operasional Lainnya		1.260.149.127	912.730.356
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>		<u><b>11.664.073.842</b></u>	<u><b>7.747.870.807</b></u>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Kerugian Restruktur Kredit	22	-	-
Beban PPAP		1.056.941.335	787.362.407
Beban Penyusutan Aset Tetap		190.507.606	182.994.145
Beban Pemasaran		121.529.409	103.572.971
Beban Administrasi Umum		6.279.049.620	4.055.258.637
Jumlah Beban Operasional		<u>7.648.027.970</u>	<u>5.129.188.160</u>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<u><b>4.016.045.872</b></u>	<u><b>2.618.682.647</b></u>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Non Operasional	23	1.971.513.777	866.088.474
Beban Non Operasional	24	1.676.435.230	700.825.688
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		<u>295.078.547</u>	<u>165.262.786</u>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<u><b>4.311.124.419</b></u>	<u><b>2.783.945.433</b></u>
Pajak Penghasilan	25	-	528.030.637
Pajak Kini		777.744.761	-
Beban/(benefit) Pajak Tangguhan		(37.520.020)	-
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<u><u><b>3.570.899.677</b></u></u>	<u><u><b>2.255.914.796</b></u></u>

### 3. Laporan Arus Kas

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
<b>Arus kas dari aktivitas operasi:</b>		
Penerimaan pendapatan bunga dari nasabah	19.199.274.986	10.051.075.729
Pembayaran bunga	(5.845.365.532)	(4.928.369.226)
Pembayaran beban operasional	(6.858.211.776)	(4.803.546.797)
Pembayaran pajak	(804.138.382)	(569.089.812)
Penerimaan Pendapatan operasional lainnya	6.495.968.654	6.065.293.542
Penerimaan pendapatan/(Pembayaran) beban non operasional	295.078.547	165.262.786
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>	<b>12.482.606.496</b>	<b>5.980.626.222</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi:</b>		
Penambahan aset tetap	(271.310.890)	(10.479.000)
Penambahan aset tak berwujud	-	-
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>	<b>(271.310.890)</b>	<b>(10.479.000)</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan:</b>		
Pinjaman yang diterima	4.754.460.640	(1.137.259.622)
Dividen	(1.240.753.137)	(1.126.119.683)
CSR	(112.795.740)	(102.374.517)
Jasa Produksi	(338.387.219)	(307.123.550)
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>	<b>3.062.524.544</b>	<b>(2.672.877.372)</b>
Kenaikan (Penurunan) arus kas	15.273.820.150	3.297.269.850
Saldo kas awal	22.000.168.926	18.702.899.075
<b>Saldo kas akhir</b>	<b>37.273.989.076</b>	<b>22.000.168.926</b>
Kas	305.532.100	272.681.999
Penempatan pada bank lain	36.968.456.976	21.727.486.925
	<b>37.273.989.076</b>	<b>22.000.168.925</b>

### 4. Laporan Perubahan Ekuitas

	Modal saham Ditempatkan & Disetor Penuh	Saldo Laba yang telah Ditentukan Penggunaannya		Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan		
<b>Saldo 31 Desember 2024</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.509.386.573</b>	<b>377.346.643</b>	<b>2.255.914.795</b>	<b>14.142.648.011</b>
Dividen	-	-	-	(1.240.753.137)	(1.240.753.137)
Pembentukan Cadangan	-	451.182.959	112.795.740	(563.978.699)	-
CSR	-	-	-	(112.795.740)	(112.795.740)
Jasa Produksi	-	-	-	(338.387.219)	(338.387.219)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	3.570.899.677	3.570.899.677
<b>Saldo 31 Desember 2025</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.960.569.532</b>	<b>490.142.383</b>	<b>3.570.899.677</b>	<b>16.021.611.592</b>

**C. OPINI AKUNTAN PUBLIK**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPR Muhadi Setia Budi, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan PT. BPR Muhadi Setia Budi tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia.

**BAB II**  
**PENGUNGKAPAN (*DISCLOSURE*) LAPORAN**  
**TAHUNAN PT. BPR MUHADI SETIA BUDI**  
**TAHUN 2025**

**A. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**1. Pernyataan Penggunaan SAK EP**

BPR menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) untuk pertama kalinya pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sehubungan dengan penerapan pertama kali tersebut, BPR telah melakukan penyajian kembali (*restatement*) atas angka-angka komparatif/periode sebelumnya agar sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

**2. Periode Akuntansi**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang ditetapkan pada tanggal 25 November 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2024 Tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2024. Dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 maka BPR ditetapkan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sebagai standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan BPR.

**3. Ikhtisar Kebijakan akuntansi BPR**

**3.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan PT. BPR Muhadi Setia Budi disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan praktek-praktek perbankan yang sesuai dengannya, serta telah disesuaikan dengan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

**3.2 Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

**3.3 Penempatan pada Bank Lain**

Merupakan penempatan dana PT. BPR Muhadi Setia Budi pada Bank Umum atau BPR lain dengan tujuan untuk mengurangi dana *idle*, cadangan likuiditas serta memperoleh pendapatan. Jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dengan pengecualian untuk tujuan tertentu. Penempatan yang diperbolehkan : Tabungan, Giro ataupun Deposito.

**3.4 Kredit Yang Diberikan**

Fasilitas yang diberikan BPR pada nasabah yang penarikan dananya sekaligus atau bertahap dan pelunasannya dilakukan dalam bentuk angsuran atau sesuai perjanjian kredit. Kredit diberikan pada nasabah perorangan/Badan yang penggunaannya untuk modal kerja, investasi ataupun konsumsi. Kredit yang diberikan disajikan pokok kredit / baki debit dikurangi provisi ditambah biaya transaksi serta dikurangi penghapusan kredit yang diberikan. Provisi dan biaya transaksi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus dan diakui sebagai penambah atau pengurang pendapatan bunga..

### 3.5 Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)

Penyisihan kerugian aset dibentuk berdasarkan penelusuran terhadap kualitas masing-masing aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat. Perhitungan cadangan dihitung dari jumlah prosentase tertentu dikalikan saldo piutang dengan mempertimbangkan nilai agunan. Adapun besarnya prosentase Penyisihan Penilaian Kualitas Aset adalah sebagai berikut :

1. PPKA umum ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar.
2. PPKA khusus ditetapkan paling sedikit adalah sebagai berikut :
  - a. 3% (tiga persen) dari Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan.
  - b. 10% (sepuluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.
  - c. 50% (lima puluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan.
  - d. 100% (seratus persen) dari Aset Produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA khusus ditetapkan paling tinggi:

- a. 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan.
- b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.
- c. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.
- d. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.
- e. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat.
- f. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan, surat izin pemakaian, atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang.
- g. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.
- i. 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank

perkreditan rakyat.

- j. 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.
- k. 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku.

Agunan selain sebagaimana dimaksud diatas tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f :

- a. Ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.
- b. Tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan dalam hal agunan memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Agunan berupa tanah dan/atau bangunan memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.
- b. Agunan dinilai oleh penilai independen yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- c. Nilai hak tanggungan paling sedikit mencakup seluruh jumlah kewajiban debitur kepada BPR.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada huruf g :

- a. Ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.
- b. Tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.

### **3.6 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)**

CKPN dibentuk sebagai penyisihan wajib saat nilai tercatat aset keuangan lebih kecil dari nilai awal, untuk mengantisipasi risiko kerugian. CKPN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.

1. Dalam menghitung rasio KPMM, BPR memperhitungkan CKPN yang dibentuk dan PPKA atas Aset Produktif.
2. Dalam hal hasil perhitungan CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA atas Aset Produktif, BPR wajib memperhitungkan selisih perhitungan CKPN yang dibentuk dengan PPKA atas Aset Produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.
3. Dalam hal hasil perhitungan CKPN yang dibentuk sama dengan atau lebih besar dari PPKA atas Aset Produktif, BPR tidak perlu memperhitungkan PPKA atas Aset Produktif dalam perhitungan rasio KPMM.

### **3.7 Agunan Yang diambil Alih (AYDA)**

Agunan yang diambil alih merupakan agunan kredit yang diserahkan debitur kepada bank untuk penyelesaian kredit. Pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. Setelah pengakuan awal, agunan yang diambil alih dinilai sebesar yang terendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual.

### 3.8 Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan garis lurus, sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yaitu sebagai berikut :

<u>Kelompok Aset Tetap</u>	<u>Masa manfaat</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>
Kelompok 1	4 Tahun	25%
Kelompok 2	8 Tahun	12.5%.

### 3.9 Uang Muka Biaya

Pengeluaran bank yang untuk sementara belum dapat dikelompokkan sebagai biaya. Uang muka akan dipindahkan sebagai biaya setelah penggunaan uang muka tersebut telah dipertanggungjawabkan.

### 3.10 Biaya Dibayar Dimuka

Pengeluaran biaya operasional yang pembebanannya dilakukan melalui amortisasi setiap bulan karena manfaat dan penggunaan.

### 3.11 Kewajiban Segera Dibayar

Kewajiban bank yang diterima dari pihak lain dan harus segera dilakukan pembayarannya baik pada pemerintah maupun pihak lain.

Kewajiban segera meliputi : Titipan Pajak Bunga Tabungan, Titipan PPh Bunga Deposito, Titipan PPh Pasal 21, Titipan Pajak Pasal 23, Titipan PPh Pasal 25, Titipan Pajak PPN, Titipan Deposito Jatuh Tempo, Kewajiban Segera Lainnya.

### 3.12 Tabungan

Simpanan nasabah pada bank dalam mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan bank sebelumnya.

### 3.13 Deposito

Simpanan pihak ketiga/nasabah pada bank sejumlah dan tertentu yang penarikannya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.

### 3.14 Simpanan Dari Bank Lain

Penempatan dari bank/BPR lain pada bank baik dalam bentuk pinjaman, deposito atau tabungan. Saldo rekening ini tidak boleh dikompesasikan dengan rekening simpanan dan kredit yang diberikan.

### 3.15 Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan telah menghitung kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK EP bab 28 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap.

Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2023 adalah program imbalan pasti.

**BAB III**  
**TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**

**A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola**

Nama BPR	PT. BPR MUHADI SETIA BUDI
Alamat	Jalan Jenderal Sudirman No. 125 Brebes
Nomor Telepon	(0283) 4511181
Penjelasan Umum	Penyusunan hasil laporan penilaian ( <i>self assessment</i> ) atas penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan ( <i>transparency</i> ), akuntabilitas ( <i>accountability</i> ), tanggungjawab ( <i>responsibility</i> ), independensi ( <i>independency</i> ) dan kewajaran ( <i>fairness</i> ).
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	Pelaksanaan fungsi tata kelola yang baik sudah dilakukan oleh manajemen PT. BPR Muhadi Setia Budi. Hal ini teridentifikasi dalam hal pemenuhan yang memadai atau prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, kelemahan tersebut tidak berdampak yang signifikan dan masih bisa diselesaikan oleh manajemen PT. BPR Muhadi Setia Budi.

**B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola**

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<b>NIK</b> : 3328102507600002
	<b>Nama</b> : Dwoyo Widyono
	<b>Jabatan</b> : Direktur Utama
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b> : Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab penuh atas kepemimpinan untuk kepentingan BPR atau pengelolaan BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar BPR serta keputusan RUPS.

2.	<b>NIK</b>	: 3376020309840004
	<b>Nama</b>	: Hariman
	<b>Jabatan</b>	: Direktur Operasional dan Kepatuhan
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b>	: Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan untuk kepentingan BPR atau pengelolaan BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar BPR serta keputusan RUPS.
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penerapan tata kelola telah dilakukan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.</li> <li>b) Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank dalam keadaan sehat.</li> <li>c) Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan <i>coaching</i>, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan peraturan perusahaan.</li> <li>d) Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif pada Bank.</li> <li>e) Temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan telah tuntas ditindaklanjuti.</li> <li>f) Temuan audit internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.</li> </ul>		

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	<b>NIK</b>	: 3329092602540001
	<b>Nama</b>	: H.M Supriyono
	<b>Jabatan</b>	: Komisaris Utama
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Komisaris, Direksi. Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</li> <li>b) Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR.</li> <li>c) Memberikan saran kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dalam hal pengerjaan BPR.</li> <li>d) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lainnya.</li> <li>e) Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan atau perbankan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li> </ul>

2.	<b>NIK</b>	: 3329131501680001
	<b>Nama</b>	: Akhmad Sudibyو
	<b>Jabatan</b>	: Komisaris
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b>	: a) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Komisaris, Direksi. Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. b) Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR. c) Memberikan saran kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dalam hal pengerjaan BPR. d) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lainnya. e) Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan atau perbankan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
	<b>Rekomendasi kepada Direksi :</b>	a) Melaksanakan penerapan tata kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b) Mempertahankan tingkat kesehatan bank selalu dalam keadaan sehat. c) Secara rutin melakukan pengelolaan sumber daya manusia yaitu : evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan <i>coaching</i> , mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan peraturan perusahaan. d) Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan <i>reward</i> atau apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif kepada BPR. e) Komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas. f) Menindaklanjuti semua temuan audit internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang. g) Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

### 3. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

<b>Daftar Komite dan Penjelasan Mengenai Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja</b>
<i>Tidak Ada Daftar Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite.</i>
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:</b> <i>PT. BPR Muhadi Setia Budi tidak memiliki fungsi komite karena modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)</i>

### 4. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

<b>Daftar Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite</b>
<i>Tidak Ada Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite</i>
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite:</b> <i>PT. BPR Muhadi Setia Budi tidak memiliki fungsi komite karena modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)</i>

## 5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

### A. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	3328102507600002	Dwoyo Widyono	Direktur Utama	0,00
2.	3376020309840004	Hariman	Direktur Operasional dan Kepatuhan	0,00

**Keterangan :**

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada PT. BPR Muhadi Setia Budi dan Perusahaan lainnya.

### B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	3329092602540001	H.M Supriyono	Komisaris Utama	0,00
2.	3329131501680001	Akhmad Sudibyو	Komisaris	0,00

**Keterangan :**

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada PT. BPR Muhadi Setia Budi dan Perusahaan lainnya.

## 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

### A. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	3328102507600002	Dwoyo Widyono	Direktur Utama	Tidak ada kepemilikan Saham	0,00
2.	3376020309840004	Hariman	Direktur Operasional dan Kepatuhan	Tidak ada kepemilikan Saham	0,00

**Keterangan :**

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada Perusahaan lainnya.

**B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Nama Perusahaan lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	3329092602540001	H.M Supriyono	Komisaris Utama	Tidak ada kepemilikan Saham	0,00
2.	3329131501680001	Akhmad Sudibyو	Komisaris	Tidak ada kepemilikan Saham	0,00

**Keterangan :**

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada Perusahaan lainnya.

**7. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR****A. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR**

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Hubungan Keuangan		
				Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3328102507600002	Dwoyo Widyono	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	3376020309840004	Hariman	Direktur Operasional dan Kepatuhan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**Keterangan :**

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada PT. BPR Muhadi Setia Budi.

**B. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR**

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Keuangan		
				Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3329092602540001	H.M Supriyono	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	3329131501680001	Akhmad Sudibyو	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**Keterangan :**

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan pada PT. BPR Muhadi Setia Budi.

## 8. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

### A. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Hubungan Keluarga		
				Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	33281025 07600002	Dwoyo Widyono	Direktur Utama	Tidak Ada Hubungan	Tidak Ada Hubungan	Tidak Ada Hubungan
2.	33760203 09840004	Hariman	Direktur Operasional dan Kepatuhan	Tidak Ada Hubungan	Tidak Ada Hubungan	Tidak Ada Hubungan

**Keterangan :**

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

### B. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Keluarga		
				Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	33290926 02540001	H.M Supriyono	Komisaris Utama	Tidak Ada Hubungan	Tidak Ada Hubungan	Tidak Ada Hubungan
2.	33291315 01680001	Akhmad Sudiby	Komisaris	Tidak Ada Hubungan	Tidak Ada Hubungan	Tidak Ada Hubungan

**Keterangan :**

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham.

## 9. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	448.140.924	2	244.949.760
2.	Tunjangan	2	97.200.000	2	6.600.000
3.	Tantiem	2	137.479.637	2	112.483.340
4.	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi Lainnya	-	-	-	-
<b>Total Remunerasi</b>			682.820.561		364.033.100

No.	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan	-	-	-	-
2.	Transportasi (Mobil)	2	221.410.000	-	-
3.	BPJS Kesehatan	2	3.043.920	1	1.155.444
4.	BPJS Ketenagakerjaan	2	2.400.000	-	
5.	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			226.853.920		1.155.444
<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>			<b>909.674.481</b>		<b>365.188.544</b>
<b>Keterangan :</b> Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi ditetapkan dalam RUPS tahunan yang meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya).					

#### 10. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,91 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,16 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,17 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,15 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,37 : 1
<b>Keterangan :</b> Rasio gaji diatas adalah imbalan kerja yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai perbulan yang diterima tetap dengan asumsi bahwa Pegawai dimaksud adalah Pegawai yang telah diangkat menjadi Pegawai tetap di PT. BPR Muhadi Setia Budi.	

### 11. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	07 Januari 2025	4	a) Pembahasan Kantor Cabang Ketanggungan; b) Penambahan personil untuk marketing; c) Kelengkapan yang belum terpenuhi bagian umum untuk segera dipenuhi; d) Pemilihan Pimpinan Kepala Cabang Ketanggungan; e) Pemilihan PE Pemasaran Dana & PE Pemasaran Kredit; dan f) Pemilihan PE Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU PPT PPSPM.
2	14 Maret 2025	4	a) Perkembangan rencana bisnis; b) Evaluasi/penetapan kebijakan strategis; c) Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR; dan d) Rencana RUPS Tahunan.
3	04 Juni 2025	8	a) Perkembangan Penyelesaian Kredit Bermasalah; b) Tindak Lanjut atas Temuan Otoritas Jasa Keuangan; dan c) Evaluasi kinerja semester 1 (satu) tahun 2025.
4	14 Juli 2025	4	a) Perkembangan Rencana Bisnis BPR tahun 2025; b) Revisi Rencana Bisnis BPR tahun 2025; dan c) Penetapan hasil revisi Rencana Bisnis BPR tahun 2025
5	15 Agustus 2025	4	a) Tindak Lanjut atas Temuan Otoritas Jasa Keuangan; b) Evaluasi/penetapan kebijakan strategis; c) Perkembangan Penyelesaian Kredit Bermasalah;
6	23 Oktober 2025	10	a) Evaluasi Perkembangan Rencana Bisnis BPR tahun 2025; dan b) Persiapan pembuatan Rencana Bisnis BPR tahun 2026;
7	12 Desember 2025	11	a) Evaluasi atas tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan; b) Pemaparan Rencana Bisnis BPR tahun 2026; dan c) Menyetujui Rencana Bisnis BPR tahun 2026 yang telah disusun;

**Keterangan :**

Dalam 1 (satu) tahun 2025 rapat koordinasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif diadakan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan dengan pembahasan yang berbeda setiap pertemuan. Rapat berlangsung efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan BPR dalam melakukan penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana kerja. Dalam risalah rapat diketahui bahwa pengambilan keputusan selalu diambil berdasarkan musyawarah secara mufakat dengan mengedepankan kepentingan BPR.

## 12. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3329092602540001	H.M Supriyono	42	0	6 %
2	3329131501680001	Akhmad Sudibyو	22	0	3,14 %

**Keterangan :**

Dalam 1 (satu) tahun 2025 rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan rapat koordinasi antara Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Cabang dan Pejabat Eksekutif dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan.

## 13. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

**Keterangan :**

Berdasarkan hasil pengawasan kegiatan operasional di tahun 2025 tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Cabang, Pejabat Eksekutif dan seluruh Pegawai BPR Muhadi Setia Budi. Hal ini dapat dicegah, karena BPR Muhadi Setia Budi selalu mengupayakan peningkatan kesejahteraan yang cukup sesuai dengan ketentuan dan kemampuan BPR untuk seluruh karyawan, menjaga kualitas SDM dengan mengikutkan pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan, sistem, prosedur dan pengendalian intern Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) yang disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi yang baru sehingga dapat terhindar adanya potensi risiko operasional.

#### 14. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
<b>Total</b>	-	-

**Keterangan :**  
 Dalam 1 (satu) tahun 2025 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Cabang, Pejabat Eksekutif dan seluruh Pegawai PT. BPR Muhadi Setia Budi.

#### 15. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Kesimpulan :**  
 Benturan kepentingan merupakan perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Kepala Cabang, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak terkait dengan BPR. Dalam 1 (satu) tahun 2025 PT. BPR Muhadi Setia Budi tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut.

#### 16. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/ NPWP	Jumlah
1	17-01-2025	Sumbangan ke panti sosial.	Pembelian beras yang disalurkan ke panti sosial di wilayah terdekat kantor BPR MSB	Yayasan Yatim dan Duafa	-	100.000.000,-
2	23-07-2025	Bantuan acara HUT RI warga RT 05 Brebes	Sumbangan dalam rangka acara HUT RI warga RT 05 Brebes di wilayah terdekat kantor BPR MSB	Ketua RT 05 Brebes	-	500.000,-

3	20-08-2025	Bantuan dana acara HUT RI Kec.Ketanggungan	Sumbangan dalam rangka acara HUT RI Kec.Ketanggungan di wilayah terdekat kantor cabang ketanggungan	Karangtaruna Kec.Ketanggungan	-	200.000,-
4	21-08-2025	Bantuan dana acara HUT RI Kel.Pakembaran	Sumbangan dalam rangka acara HUT RI Kel. Pakembaran di wilayah terdekat kantor cabang slawi	Karangtaruna Kelurahan Pakembaran	-	200.000,-
5	15-10-2025	Bantuan lomba bulu tangkis kel. Pakembaran – slawi	Sumbangan dalam rangka mendukung acara perlombaan bulu tangkis di wilayah terdekat kantor cabang slawi	Panitia lomba bulu tangkis kelurahan pakembaran – slawi	-	200.000,-
6	14-11-2025	Bantuan HUT ke 45 Satpam	Sumbangan untuk HUT Satpam ke 45 tingkat Polres Tegal	Panitia HUT Satpam	-	160.000,-
7	17-11-2025	Bantuan acara bulan Bahasa di UMUS	Sumbangan dalam rangka bulan Bahasa di UMUS	Panitia acara	-	1.000.000,-
8	17-11-2025	Bantuan HUT ke 45 Satpam	Sumbangan untuk HUT Satpam ke 45 tingkat Polres Brebes	Panitia HUT Satpam	-	100.000,-
9	19-11-2025	Bantuan acara manasik haji	Sumbangan acara manasik haji RA Kabupaten Brebes	Panitia acara	-	1.000.000,-
10	20-11-2025	Bantuan komunitas angklung	Sumbangan untuk komunitas angklung brebes	Ketua komunitas	-	100.000,-

**Kesimpulan :**

Dalam 1 (satu) tahun 2025 terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial pada PT. BPR Muhadi Setia Budi dengan dana khusus program *corporate responsibility* (CSR), kegiatan sosial dilakukan secara beragam untuk mendukung kegiatan masyarakat di wilayah terdekat kantor PT. BPR Muhadi Setia Budi.

## **BAB IV PENUTUP**


Keseluruhan rangkaian laporan tahunan 2025 telah kami selesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat, yang antara lain mencakup :


1. Informasi Umum
2. Laporan Keuangan Tahunan
3. Opini Akuntan Publik
4. Surat Pernyataan Direksi
5. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola

Pada tahun 2025 ini sangat penting untuk menerapkan pelaksanaan Aset Likuiditas dan Manajemen (ALMA) dengan melakukan penataan organisasi dan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia yang ada mampu meningkatkan kontribusi pada masa yang akan datang sehingga target yang ditetapkan PT. BPR Muhadi Setia Budi Brebes dapat tercapai.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan tahun 2025, maka sasaran yang ingin dicapai adalah untuk selalu mengevaluasi perkembangan pada tahun berjalan untuk dapat digunakan sebagai tolak ukur pada masa yang akan datang sehingga PT. BPR Muhadi Setia Budi dapat tumbuh dan berkembang serta dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi mitra dalam pengelolaan aktivitas keuangan.

Menyetujui,  
Dewan Komisaris

  
H.M Supriyono  
Komisaris Utama

  
Akhmad Sudibyo  
Komisaris

Brebes, 27 April 2026  
PT. BPR Muhadi Setia Budi  
Direksi

  
Dwoyo Widyono  
Direktur Utama

  
Hariman  
Direktur Operasional & Kepatuhan

